



ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN DESA WISATA BATIK KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG

Muarifuddin ✉, Sungkowo Edy Mulyono & Abdul Malik

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP Universitas Negeri Semarang

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Desember 2015

Disetujui Januari 2016

Dipublikasikan Februari 2016

Kata Kunci:

Pembangunan; Desa Wisata;

Batik; Asesmen

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis hambatan internal (kelemahan) maupun eksternal (tantangan) pengembangan desa wisata batik Desa Babagan, merumuskan strategi alternatif serta keberadaan showroom dalam merespon terbentuknya koperasi. Penelitian deskriptif kualitatif ini pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, metode dan teori. Teknik analisis data menggunakan model interaktif. Subjek penelitian terdiri dari pengrajin batik, kepala desa dan tokoh masyarakat. Simpulan yang didapatkan masih banyaknya kelemahan Desa Babagan sebagai desa wisata batik karena memang baru tahun 2015 diresmikan. Tantangan terbesar terletak pada penekanan budaya batik lokal bagi masyarakat luas. Adapun Strategi alternatifnya dengan mendorong masyarakat dan pemerintah menciptakan iklim kondusif bagi berkembangnya kegiatan wisata sekaligus masyarakat menjadi pelaku sektor kepariwisataan dan penguatan usaha, mengikutsertakan masyarakat berbagai kegiatan, pemerintah dilibatkan setidaknya sebagai donatur penyelenggara kegiatan, diadakannya pelatihan berbasis *hardskill* dan *softskill* serta pembinaan dan pendampingan dari dinas terkait, pelatihan mengenai strategi pengelolaan usaha serta pemasaran, menata kembali organisasi pengelola desa wisata batik, rekondisi pengelolaan showroom sekaligus sebagai koperasi. Begitu pula yang terjadi pada showroom dapat merespon terbentuknya koperasi, dikarenakan pengelolaan showroom tersebut telah terjadi kegiatan menuju terbentuknya pra koperasi. Namun, hal yang menjadi perhatian yaitu masih kurangnya pemahaman masyarakat adanya keberadaan koperasi berikut pula pemanfaatannya.

© 2015 PNF FIP UNNES

✉ Alamat korespondensi:

Gedung A2 Lantai 2 Jurusan PLS FIP UNNES

Kampus Sekaran Gunungpati Semarang

E-mail: muarif@mail.unnes.ac.id

ISSN 2442-532X

PENDAHULUAN

Pembangunan perdesaan merupakan bagian terpenting dari pembangunan nasional, mengingat kawasan perdesaan yang masih dominan dibanding perkotaan. Pembangunan perdesaan bersifat multi dimensional dan multisektor. Secara administratif, jumlah desa yang ada di Indonesia terus bertambah. Pada tahun 2008 terdapat 67.245 desa dan hanya 7.893 kelurahan dibandingkan pada tahun 2005 yaitu 61.409 desa dan 7.365 kelurahan (Statistik Potensi Desa-BPS 2008). Data BPS tahun 2009 juga menunjukkan, dari 32,53 juta jumlah orang miskin di Indonesia lebih dari separuhnya tinggal di perdesaan, yaitu 22,2 juta jiwa.

Berita resmi Badan Pusat Statistika No. 06/01/Th.XVI, 2 Januari 2013 jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2012 mencapai 28,59 juta orang. Dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa yaitu (15,82 juta orang), sementara jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan (0,93 juta orang). Begitu pula yang terjadi pada berita resmi Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah No. 40/07/33/Th.VIII, 1 Juli 2014 selama periode September 2013 - Maret 2014, pada September 2013 sebagian besar (60,24 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan begitu pula pada Maret 2014 (59,78 persen). Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Jawa Tengah pada Maret 2014 mencapai 4,836 juta orang (14,46 persen), meningkat sekitar 25,11 ribu orang (0,02 persen) jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2013 yang sebesar 4,811 juta orang (14,44 persen).

Fenomena pembangunan di era globalisasi dihadapkan pada permasalahan yang semakin kompleks. Kualitas manusia dalam pembangunan ditunjukkan adanya keberhasilan dari pembangunan itu sendiri. Pembangunan yang terjadi di perdesaan akan berimbang pada keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan makna pembangunan desa yang disajikan Departemen Dalam Negeri (1996: 4) bahwa seluruh proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa/kelurahan yang merupakan bagian tak

terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil dalam susunan negara yang perlu dibina dan ditingkatkan pelayanan administrasi pemerintahannya kearah yang lebih memadai kepada masyarakat desa. Sebagaimana yang dikemukakan Adisasmita (2006: 4) bahwa pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Tujuan yang ingin dicapai tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam (SDA) mereka, melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa masyarakat dengan adanya sumber daya manusia (SDM).

Dalam berbagai wacana pembangunan, potensi keunggulan lokal sudah sangat familiar untuk dimasukkan ke dalam berbagai perhitungan dan analisis pembangunan masyarakat. Melalui proses pembangunan yang memberikan fokus perhatian pada dimensi manusia dan masyarakatnya. Kaitan dengan pernyataan tersebut, Soetomo (2010: 23) menyampaikan dalam banyak hal, pembangunan masyarakat dapat dilihat sebagai bentuk aktivitas bersama untuk memenuhi tujuan bersama di antara warganya.

Kesenjangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan serta kemiskinan di perdesaan terjadi karena kurangnya keberdayaan warga masyarakat dalam mengoptimalkan potensi lokal yang ada di daerahnya. Warga desa memilih untuk ke kota karena memiliki pemikiran mereka akan hidup sejahtera jika berada di kota. Begitu pula kondisi yang sedang terjadi saat ini di daerah Lasem Kabupaten Rembang. Daerah di Jawa Tengah yang terkenal dengan sentral industri batik tulisnya itu, memberikan nuansa yang berbeda meski tidak setenar batik produksi Pekalongan ataupun Solo. Kendati demikian kehadiran Batik Tulis Lasem (Batik Khas Kabupaten Rembang), merupakan kebanggaan tersendiri bagi penduduk kota nelayan ini.

Sedangkan desa satu-satunya yang terkenal dengan industri batiknya bahkan telah diresmikan sebagai desa wisata batik tulis adalah Desa Babagan yang berada di Kecamatan Lasem tersebut.

Batik tulis lasem sendiri menjadi potensi lokal unggulan dimana pemerintah Kabupaten Rembang telah melakukan berbagai terobosan. Diantaranya dengan menggandeng Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai mitra dalam permodalan bagi para pengrajin batik. Tentu tidak hanya cukup berhenti di situ, dari sisi seluruh warga masyarakat tentu berperan aktif melakukan berbagai pemikiran pengembangan. Keseriusan mengangkat potensi batik tulis lasem menjadikan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang sebagai salah satu kabupaten yang memiliki daya tarik tinggi dan perhatian langsung maupun tidak langsung sekaligus pengaruh terhadap wilayah sekitarnya.

Keberhasilan program seperti ini mengedepankan kemandirian kelompok lokal sendiri bukan dari luar. Keberhasilan juga terletak pada mulai dari tradisi dalam partisipasi masyarakat dengan organisasi yang terdesentralisasi, dan sepenuhnya memanfaatkan sumber daya lokal. Oleh karenanya analisis kebutuhan pengembangan desa wisata batik di Desa Babagan sangat penting untuk dikaji kaitannya dengan pengembangan kemajuan desa wisata batik tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis hambatan internal (kelemahan) maupun eksternal (tantangan) para pengrajin batik dalam mengembangkan desa wisata batik Desa Babagan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, merumuskan strategi alternatif serta keberadaan showroom dalam merespon terbentuknya koperasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus penelitian hanya ditekankan pada kelemahan dan tantangan pengembangan desa wisata batik Desa Babagan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, penentuan strategi alternatif dan respon terhadap showroom dalam pembentukan koperasi.

Pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, metode dan teori. Teknik analisis data yang dipakai adalah model interaktif. Subjek penelitian terdiri dari pengrajin batik, kepala desa dan tokoh masyarakat di Desa Babagan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Babagan Kecamatan Lasem telah lama ini dikenal sebagai desa wisata batik. Hal ini dibuktikan telah adanya kegiatan peresmian sebagai desa wisata batik serta banyaknya kegiatan produksi batik di desa ini. Di Desa Babagan telah ada 15 pengrajin/pengusaha batik. Masing-masing pengrajin memiliki jumlah pembatik yang berbeda.

A. Hambatan Pengrajin Batik dalam Mengembangkan Desa Wisata Batik

Desa Babagan sudah sangat potensial untuk dikembangkan menjadi salah satu pionir pengembang budaya batik tulis Lasem. Batik tulis Lasem menjadi ciri khas sendiri dari adanya beberapa batik yang telah ternama, sebagai contoh batik Pekalongan, Banyumas, Yogya, dan Solo. Desa Babagan ini menandakan bahwa batik tulis Lasem terangkat kembali, sebagaimana telah lama Lasem diinisiasi sebagai sentra batik tulis yang ada di Rembang. Sebagai masa awal implementasinya, pengembangan Desa Babagan sebagai Desa Wisata Batik Tulis Lasem ini tentu memiliki banyak kendala/hambatan.

Hambatan dapat secara internal/kelemahan (*weakness*), dan hambatan secara eksternal/tantangan/ancaman (*traith*). Beberapa kelemahan dirasakan oleh para pengrajin batik Desa Babagan dalam mengembangkan desa wisata batiknya. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang pengrajin Batik sebut saja Bu SW di Desa Babagan yang sangat terkenal itu sebagai berikut,

Barangkali masih ada sebagian kecil warga masyarakat yang acuh tak acuh dengan adanya pembangunan desa wisata batik ini. Mungkin saja bisa dikarenakan mereka tidak memiliki kemampuan akan hal ini, tidak bisa menangkap peluang yang ada ... (W1/PB/29.06.2015)

Apa yang dikemukakan Bu Sw ini menggambarkan sebagian kecil warga masyarakat menunjukkan adanya tingkat partisipasi yang rendah. Mereka belum memahami sepenuhnya suatu desa yang dijadikan sebagai tempat wisata. Mereka beranggapan dengan mudah dapat mengakses pinjaman dari perbankan, padahal tidak demikian. Berikut hambatan secara internal yang dikemukakan Bapak JSP yang juga seorang pengrajin batik, "Faktor penghambat, apa ya Mas. Bisa juga keterbatasan kami untuk mendapatkan pinjaman modal yang besar dan mudah bagi kami terutama para pengrajin batik" (W2/PB/30.06.2015). Hal demikian sebagaimana pula disampaikan Kepala Desa Babagan,

Mereka kebanyakan kendalanya di modal Mas. Tidak mudah mendapatkan modal pinjaman dari bank dengan jumlah besar terutama mereka yang usahanya masih kecil. Karena memang pihak bank pula juga belum bisa mempercayai sepenuhnya pada mereka. Butuh waktu untuk itu semua (W3/KD/30.06.2015).

Menurut Bapak SW sebagai Tokoh Masyarakat sekaligus pengrajin batik yang ada di Desa Babagan beranggapan bahwa perkembangan batik tulis Lasem yang ada di Desa Babagan ini sangat pesat. Apalagi sejak dinamakannya Desa Babagan ini sebagai Kampung Batik atau tempat wisata batik. Berikut kendala internal menurut Bapak SG,

... Saat itu timbullah hambatan atau kendala. Lha depan rumah saya itu meski jalannya sudah lebar tapi rusak ek Dek. Lha wong sering dilewati truk-truk besar yang mau ke bengkel sebelah rumah saya. Belum lagi kalau ada tamu terus truk itu ada yang masih berada di depan kawasan rumah saya ... (W4/TM/01.07.2015).

Adanya beberapa hambatan internal atau kelemahan yang ada di Desa Babagan untuk dapat mengembangkan desa wisata batiknya, juga adanya beberapa hambatan secara eksternal yang ini disebut juga sebagai tantangan. Berikut yang diutarakan Bu SW menanggapi hambatan secara eksternal,

Kalau hambatan dari luar ya tidak adanya responsif pemerintah, baik itu melakukan pelatihan-pelatihan untuk para pembatik maupun dana bantuan modal pagi para

pengrajin maupun yang sifatnya dana bergulir terutama mereka yang masih kecil usahanya agar bisa cepat besar. Sehingga pemerintah ini juga biar tahu, kalau warga masyarakat terutamanya pada pengrajin dan pembatik ini masih banyak mempunyai kendala dalam memajukan Desa Babagan sebagai Kampung Wisata Batik. Juga ini Mas, mereka para pengrajin batik dari luar desa ini mereka meri kalau usaha batik Desa Babagan terutama batik saya ini laku keras. Apalagi setiap ada kegiatan apa saja, baik itu pameran atau menjadi pelatih batik ngisi di beberapa tempat itu saya yang tunjuk untuk makili, mereka sok podo meri ... (W1/PB/29.06.2015).

Sebagaimana yang disampaikan Bu SW ini, juga senada yang dikemukakan Bapak Kepala Desa sebagai berikut,

Nah kui Mas, kemarin sempat rame masalah iri mergo Mbak W kui se sering dipasrahi BNI maupun dinas untuk menjadi pelatih atau ikut mewakili daerah Rembang dalam acara pameran batik di mana-mana Mbak W terus, baik di Semarang, Surabaya maupun di Pusat Jakarta ... (W3/KD/30.06.2015).

Hal yang dikemukakan Bu SW dan Bapak Kepala Desa ini tergambar bahwa dalam dunia usaha, pelaku usaha dalam menyambut potensi pasar tentu akan berbeda-beda. Ada yang memiliki *link, partner* sehingga memudahkan pemasaran hasil usahanya. Senada yang diungkapkan Bu SW saat itu ia menambahkan mengenai tantangan ke depan dalam pengembangan usaha apalagi menciptakan Desa Babagan sebagai Desa Wisata Batik yang berkelanjutan,

Ohh iya Mas, tantangan ke depan itu juga akan semakin besar dengan adanya apa itu MEA ya apa Masyarakat Ekonomi Asean mboh itu yang gimana. Pastinya dunia usaha akan semakin terbuka lebar, persaingannya pasti lebih ketat lagi. Wo saya yang begitu tadi saja seakan wis ra sanggup wo dicaci maki di hasut orang lain seperti itu ... (W1/PB/29.06.2015).

Menurut Bapak SM, yang menjadi hambatan secara eksternal adalah,

... dinas kepariwisataan mustinya lebih rajin lagi ikut terlibat dalam pengembangan desa wisata batik ini. Sebagai contoh ikut menyalurkan pemasaran hasil batik kami, lalu bantuan apa gitu yang bisa meningkatkan usaha kami, atau bahkan pelatihan-pelatihan seperti kalau kita ingin maju seperti batik Pekalongan, Solo kita punya bahan stok bisa bikin sendiri itu bahan-bahan pembuat batik. Koyo to canting, dan malam nek iso nek kene diajari gawe malam ben ra kudu moro Solo moro Pekalongan tuku malame. Iyo ngunu kui Mas. (W6/PB/01.09.2015)

Hal senada juga disampaikan Bu LK, menurutnya yang menjadi hambatan eksternal adalah,

Pemasaran hasil usaha saya Mas. Saya kan masih pengrajin batik kecil belum punya banyak relasi, kenalan juga wadah sebagai informasi untuk menyebarkan usaha batik saya ini. Saya dengan usaha saya ini juga berjalan seperti ini, kalau dibilang berkembangnya pelan. Ya karena juga untuk mendapatkan modal pinjaman yang

besar juga susah, pemerintah juga belum secara serius berperan aktif menjembatani memfasilitasi kami ini para pengrajin batik kecil agar bisa cepat berkembang. Pelatihan-pelatihan bagaimana kek untuk mengelola usaha batik ini, lalu pengadaan bahan-bahan batik kalau bisa kami diajari membuat malam lalu produksi canting beserta pokoknya alat dan bahan batik itu bisa kita buat sendiri Mas intinya. Kayak pewarnanya juga, sehingga tidak jauh-jauh beli ke Solo, Pekalongan dan lainnya. (W5/PB/01.07.2015)

Beberapa hambatan eksternal nampaknya memang tertuju pada keterlibatan pemerintah. Warga mengharap banyak kepada keterlibatan pemerintah, dapat memenuhi berbagai kebutuhan bagi para pengrajin batik yang ada di Desa Babagan. Dari beberapa kendala atau hambatan internal maupun hambatan eksternal yang telah dikemukakan di atas, sesungguhnya dapat disajikan dalam tabel berikut ini,

Tabel 1. Hambatan Internal dan Eksternal Desa Babagan dalam Mengembangkan Desa Wisata Batik

Hambatan Internal (Kelemahan)	Hambatan Eksternal (Tantangan)
a. Masih rendahnya partisipasi Masyarakat.	a. Terbatasnya akses pinjaman modal yang relatif besar terutama bagi pengusaha kecil.
b. Pendidikan rendah.	b. Terbatasnya akses pinjaman modal dengan Bank BNI selaku mitra kerja pengembang Desa Wisata Batik di Desa Babagan.
c. Ambisi tinggi tanpa diimbangi dengan kemampuan dan ketekunan.	c. Rendahnya partisipasi pemerintah daerah serta pemerintah pusat.
d. Belum terbentuknya koperasi usaha atau koperasi simpan pinjam.	d. Tingginya persaingan pasar usaha pakaian.
e. Fungsi Pokdarwis yang kurang maksimal.	e. Adanya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) membuat pangsa pasar semakin terbuka lebar dan peluang usaha semakin ketat.
f. Infrastruktur atau sarana prasarana yang kurang memadai.	f. Kurangnya pembinaan dan pendampingan dari dinas terkait.
g. Terbatasnya akses pemasaran hasil usaha.	g. Produk alat dan bahan dasar membatik yang kian tinggi persaingannya, serta pemenuhan kebutuhan alat dan bahan membatik masih mengandalkan dari daerah lain.
h. Belum adanya pengelolaan terutama yang berfungsi sebagai <i>guide</i> (sumber informasi awal) bagi wisatawan yang berkunjung, sehingga kelengkapan sumber informasi desa wisata masih rendah.	h. Belum terjangkaunya batik tulis bagi masyarakat umum, karena harganya yang relatif lebih mahal dibanding dengan batik cap maupun batik pabrik.
i. Rendahnya partisipasi pemerintah desa.	i. Ancaman batik tulis sebagai warisan budaya Bangsa Indonesia dialihnamakan atau diakui sebagai warisan budaya bangsa lain.
j. Tidak adanya aktivitas kegiatan kecakapan tambahan seperti pelatihan membatik, pelatihan membuat alat perlengkapan serta bahan membatik.	
k. Fungsi showroom yang belum maksimal.	

Sumber: diolah dari data primer 2015.

Dari hasil penelitian, dapat dirumuskan berbagai hambatan yang terjadi dari para pengrajin batik yang ada di Desa Babagan. Hambatan tersebut dapat berupa hambatan dari

dalam atau hambatan internal juga hambatan dari luar atau eksternal. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Sunaryo (2013: 227) keberhasilan pengembangan kepariwisataan

adalah dapat diciptakannya iklim kondusif, dan iklim kondusif itu terkait dengan dukungan, penerimaan dan partisipasi masyarakat.

Berikut beberapa ahli yang mengungkapkan pentingnya partisipasi. Menurut Soetomo (2008: 441) bahwa, "... bahwa partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan seperti dalam penyelenggaraan pembangunan desa berbasis potensi local". Sedangkan, Myers (1995: 310) mengutarakan partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan bersama dalam sebuah lembaga oleh individu-individu untuk melakukan sesuatu dalam komunitas. Dalam hal ini dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat secara internal dengan lingkungan sekitar komunitasnya. Myers juga menjelaskan lagi bahwa "*it refer to participation by community members, collectively, in large project or programme that requires interaction with others outside the community*" dengan arti merujuk pada partisipasi anggota masyarakat secara kolektif, dan memerlukan interaksi dalam sebuah program dengan masyarakat sekitarnya dan masyarakat yang datang dari luar.

Adisasmita (2006: 36) menyampaikan mengapa masyarakat diajak berperan serta dan didorong untuk berpartisipasi, diantara alasannya adalah anggota masyarakat dianggap bahwa mereka mengetahui sepenuhnya tentang permasalahan dan kepentingannya atau kebutuhan mereka. Adisasmita (2006: 119) dalam bukunya yang lain menyampaikan, pembangunan masyarakat seharusnya menerapkan prinsip-prinsip: (1) transparansi (keterbukaan), (2) partisipatif, (3) dapat dinikmati masyarakat, (4) dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan (5) berkelanjutan (*sustainable*). Tiap usaha pembangunan tentunya didasarkan pada kekuatan serta kemampuan masyarakat itu sendiri, dengan maksud tidak terlalu mengharapkan pemberian bantuan dari luar baik swasta maupun pemerintah.

Kegiatan pembangunan selain adanya faktor pendukung juga adanya faktor penghambat yang itu merupakan kelemahan maupun tantangan bagi kemajuan pembangunan yang telah dilaksanakan. Berbagai faktor pendukung juga penghambat yang ada, hal itu sebagai upaya

yang dianggap penting untuk dipahami demi keberlanjutan pengembangan pembangunan. Adisasmita (2006: 2) mengungkapkan,

dalam melaksanakan pembangunan di daerah perdesaan menghadapi hambatan dan kendala yang tidak ringan dilihat dari aspek geografis, topologis, demografis, ketersediaan sarana prasarana, kelemahan dalam akses modal dan informasi pasar, kemampuan sumberdaya manusia (SDM) yang lemah, partisipasi masyarakat masih belum secara proaktif, kemampuan kelembagaan perdesaan masih lemah dan masih banyak kelemahan operasional dan fungsional lainnya.

Adanya berbagai hambatan, kendala dianggap menjadi suatu upaya yang sangat penting dalam mendorong, meningkatkan, mengembangkan dan mengaktualisasikan kekuatan dan kemampuan yang bersumber di dalam masyarakat perdesaan itu sendiri. Adisasmita (2006: 5) secara umum menyatakan bahwa "hambatan utama yang dihadapi daerah perdesaan adalah terbatasnya ketersediaan prasarana untuk mengembangkan kegiatan produksi dan akses pemasaran dan terbatasnya sarana pelayanan pendidikan dan kesehatan".

faktor-faktor yang menghambat pemberdayaan menurut Nasdian (2014), dapat ditelaah dari dimensi struktural-kultural. Dimensi struktural bersumber pada struktur sosial yang berlaku dalam suatu komunitas. Dimensi kultural adalah sikap pasrah dari anggota komunitas karena terjat dalam berbagai macam kekurangan sehingga tidak memiliki inisiatif, gairah, dan tidak dinamis untuk mengubah nasib mereka yang kurang baik. Hampir senada dengan pendapat Nasdian, Watson (Adi, 2008) menuliskan beberapa kendala yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan (pembangunan). Kendala tersebut secara garis besar terbagi atas dua bagian, yaitu kendala yang berasal dari kepribadian individu (*internal*) dan kendala yang berasal dari sistem sosial (*eksternal*). Sedangkan Hadiyanti (2006: 20), ada beberapa faktor internal yang menghambat pemberdayaan antara lain,

kurang bisa untuk saling mempercayai, kurang daya inovasi/kreativitas, mudah pasrah/ menyerah/putus asa, aspirasi dan

cita-cita rendah, tidak mampu menunda menikmati hasil kerja, wawasan waktu yang sempit, familisme, sangat tergantung pada bantuan pemerintah, sangat terikat pada tempat kediamannya dan tidak mampu/tidak bersedia menempatkan diri sebagai orang lain.

Betapapun suatu program telah direncanakan secara matang, namun dapat dipastikan dalam tahap pelaksanaan menemui berbagai hambatan. Hal ini juga tentu terjadi dalam pembangunan desa wisata batik yang ada di Desa Babagan Kecamatan Lasem. Tentunya, faktor yang mempengaruhi pembangunan tersebut dapat dicarikan solusi serta strategi alternatifnya.

B. Identifikasi Kebutuhan dalam Merumuskan Strategi Alternatif Pengembangan Desa Wisata Batik

Identifikasi kebutuhan untuk merumuskan strategi alternatif memiliki arti sebagai strategi mengatasi kelemahan dan menghindari ancaman atau disebut juga sebagai strategi *defensif* dalam analisis SWOT penelitian ini hanya menggunakan analisis WT. mengatasi kelemahan adanya hambatan internal dan menghindari ancaman atau tantangan dari hambatan eksternal. Sehingga dalam menjawab strategi alternatif dapat dilakukan berdasarkan kemampuan peneliti serta wawancara mendalam dengan *keyperson*. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dirumuskan sebagaimana tabel 2 dan 3.

Sebagaimana Sunaryo (2013: 225) yang mendeskripsikan pembangunan sektor kepariwisataan pada prinsipnya sangat memerlukan adanya dukungan yang berupa komitmen, peran aktif dan keterlibatan sinergis dari semua pemangku kepentingan terkait, baik dari unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat. Demikian halnya harapan pembangunan desa wisata di Desa Babagan, masing-masing pihak sesuai otoritas dan kapasitasnya memiliki fungsi dan peran yang sinergis. Hal ini tentu prioritas utama pembangunan tersebut harus dilakukan sebagaimana dalam pengembangan potensi pembangunan berbasis masyarakat. Mualissin (2007) memberikan *guidelines model* bagi proses

pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, yaitu

- 1) Mengidentifikasi prioritas pembangunan yang dilakukan penduduk lokal (resident).
- 2) Mempromosikan dan mendorong penduduk lokal.
- 3) Pelibatan penduduk lokal dalam industri.
- 4) Investasi modal lokal untuk wirausaha sangat dibutuhkan.
- 5) Partisipasi penduduk dalam event-event dan kegiatan yang luas.
- 6) Produk wisata untuk menggambarkan identitas lokal.
- 7) Mengatasi problem-problem yang muncul sebelum pengembangan yang lebih jauh. (Hadiwijoyo, 2012:73).

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat sebagaimana di Desa Babagan barangkali selama ini modal yang didapatkan masih bergantung dari pihak luar (Bank BNI), keberadaan wadah atau lembaga kemasyarakatan dapat berfungsi sebagai pengganti dari pihak luar dalam permodalan. Hal ini tentu partisipasi sepenuhnya dari masyarakat sangat diharapkan. Ernawati (2010: 4) mengungkapkan dalam konteks CBT (Community Based Tourism) yaitu model manajemen kepariwisataan yang dikelola oleh masyarakat setempat yang berupaya untuk meminimalkan dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan dan budaya dan pada saat yang sama menciptakan dampak ekonomi yang positif. Masyarakat tinggal disekitar obyek dan daya tarik pariwisata, sesungguhnya penduduk adalah bagian dari atraksi wisata itu sendiri.

Selain itu, Mualissin (2007) mengemukakan konsep CBT mempunyai prinsip-prinsip yang dapat digunakan sebagai *tool of community development* bagi masyarakat lokal, yaitu

1. Mengakui, mendukung dan mempromosikan pariwisata yang dimiliki masyarakat.
2. Melibatkan anggota masyarakat sejak awal pada setiap aspek.
3. Mempromosikan kebanggaan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas hidup.
5. Menjamin sustainabilitas lingkungan.
6. Memelihara karakter dan budaya lokal yang unik.
7. Membantu mengembangkan cross-cultural learning.

8. Menghormati perbedaan-perbedaan kultural dan kehormatan manusia.
9. Mendistribusikan keuntungan secara adil di antara anggota masyarakat.
10. Menyumbang prosentase yang ditentukan bagi income proyek masyarakat. (Hadiwijoyo, 2012: 72).

Tabel 2. Isu Strategis Desa Babagan dalam Mengembangkan Desa Wisata Batiknya

MASALAH Kelemahan	AKAR MASALAH	SOLUSI
a. Masih rendahnya partisipasi Masyarakat.	a) Rendahnya partisipasi masyarakat dan pemerintah.	a) Peningkatan partisipasi masyarakat.
b. Pendidikan rendah.	b) Rendahnya kemampuan <i>hardskill</i> dan <i>softskill</i> masyarakat.	b) Peningkatan peran dari pemerintah dalam pembangunan desa wisata batik.
c. Ambisi tinggi tanpa diimbangi dengan kemampuan dan ketekunan.	c) Belum adanya koperasi usaha.	c) Peningkatan kemampuan <i>hardskill</i> masyarakat.
d. Belum terbentuknya koperasi usaha atau koperasi simpan pinjam.	d) Infrastruktur kurang memadai.	d) Peningkatan kemampuan <i>softskill</i> masyarakat.
e. Fungsi Pokdarwis yang kurang maksimal.	e) Pengelolaan dan keberfungsian organisasi desa wisata batik masih rendah.	e) Merintis pembentukan koperasi usaha.
f. Infrastruktur atau sarana prasarana yang kurang memadai.	f) Terbatasnya akses modal dan pemasaran.	f) Pengadaan dan perbaikan infrastruktur.
g. Terbatasnya akses pemasaran hasil usaha.	g) Daya saing pasar global.	g) Optimalisasi keberfungsian organisasi desa wisata batik.
h. Belum adanya pengelolaan terutama yang berfungsi sebagai <i>guide</i> (sumber informasi awal) bagi wisatawan yang berkunjung, sehingga kelengkapan sumber informasi desa wisata masih rendah.		h) Usaha pemenuhan pinjaman modal bagi para pengrajin.
i. Rendahnya partisipasi pemerintah desa.		i) Penyediaan fasilitas pemasaran hasil usaha.
j. Tidak adanya aktivitas kegiatan kecakapan tambahan seperti pelatihan membatik, pelatihan membuat alat perlengkapan serta bahan membatik.		j) Peningkatan strategi pemasaran.
k. Fungsi showroom yang belum maksimal.		
Tantangan		
l. Terbatasnya akses pinjaman modal yang relatif besar terutama bagi pengusaha kecil.		
m. Terbatasnya akses pinjaman modal dengan Bank BNI selaku mitra kerja pengembang Desa Wisata Batik di Desa Babagan.		
n. Rendahnya partisipasi pemerintah daerah serta pemerintah pusat.		
o. Tingginya persaingan pasar usaha.		
p. Adanya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) membuat pangsa pasar semakin terbuka lebar dan peluang usaha semakin ketat.		
q. Kurangnya pembinaan dan pendampingan dari dinas terkait.		
r. Produk alat dan bahan dasar membatik yang kian tinggi persaingannya, serta pemenuhan kebutuhan alat dan bahan membatik masih mengandalkan dari daerah lain.		
s. Belum terjangkaunya batik tulis bagi masyarakat umum, karena harganya yang relatif lebih mahal dibanding dengan batik cap maupun batik pabrik.		
t. Ancaman batik tulis sebagai warisan budaya Bangsa Indonesia dialihnamakan atau diakui sebagai warisan budaya bangsa lain.		

Sumber: diolah dari data primer 2015.

Tabel 3. Strategi Alternatif Pengembangan Desa Wisata Batik Desa Babagan

No.	Strategi yang diterapkan
1.	Mendorong masyarakat dan pemerintah untuk dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya kegiatan wisata sekaligus masyarakat dapat menjadi pelaku sektor kepariwisataan dan penguatan usaha tersebut.
2.	Mengikutsertakan masyarakat dalam berbagai kegiatan desa wisata batik, sebagai contoh: menjadikan pengurus organisasi, mengikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan serta pameran batik.
3.	Di setiap penyelenggaraan kegiatan desa wisata batik, pemerintah dilibatkan paling tidak sebagai donatur penyelenggara kegiatan.
4.	Diadakannya kegiatan pelatihan-pelatihan berbasis <i>hardskill</i> dan <i>softskill</i> serta pembinaan dan pendampingan dari dinas terkait, sebagai contoh oleh dinas kepariwisataan.
5.	Diselenggarakannya pelatihan-pelatihan strategi pengelolaan usaha, strategi pemasaran serta kiat sukses dalam berwirausaha.
6.	Merintis pembentukan koperasi oleh para pengrajin batik di Desa Babagan dengan adanya dana bergulir, serta memfungsikannya sebagai tempat simpan pinjam usaha dan kelompok usaha bersama (KBU)
7.	Menata kembali organisasi pengelola desa wisata batik, sebagai contoh dengan menegaskan tupoksi masing-masing, pengadaan pelatihan kepemimpinan dan mempercayakan segala kegiatan pengelolaan desa wisata batik pada para pengelolanya
8.	Rekondisi pengelolaan showroom yang telah ada sebagai fasilitas bersama secara merata bagi semua para pengrajin batik di Desa Babagan
9.	Peningkatan infrastruktur yang memadai dalam menunjang optimalisasi pengembangan desa wisata batik

Selain prinsip-prinsip yang telah dikemukakan sebelumnya, Hadiwijoyo (2012: 74) menyampaikan supaya pelaksanaan CBT dapat berhasil dengan baik, terdapat beberapa elemen yang harus diperhatikan yaitu mencakup (1) sumberdaya alam dan budaya, (2) organisasi-organisasi masyarakat, (3) manajemen, dan (4) pembelajaran. Hal ini terlebih lagi tersirat bahwa peran lembaga atau organisasi-organisasi kemasyarakatan sangat dibutuhkan demi terselenggaranya pembangunan desa wisata menuju pada Community Based Tourism (CBT).

C. Pembentukan Koperasi Desa dari adanya showroom yang dibangun oleh BNI sebagai mitra usaha masyarakat

Desa Babagan dalam inisiasinya sebagai Desa Wisata Batik menjalin mitra kerjasama dengan BNI. Hingga peresmiannya, pihak BNI lah yang memiliki acara tersebut bersama masyarakat. peresmian Desa Babagan sebagai Desa Wisata Batik waktu itu tanggal 26 Februari 2015 diresmikan langsung oleh Plt Bapak Bupati saat itu. Sehingga dapat dipahami bahwa acara tersebut dari pihak BNI dengan menggandeng dinas kepariwisataan setempat beserta masyarakat sekitar. Kondisi tersebut peneliti jumpai langsung di lapangan tempat penelitian.

Adanya gapura selamat datang sebagai pintu masuk Desa Babagan juga dibiayai oleh BNI. Begitu juga showroom yang ada di dekat gapura masuk, itupun didirikan oleh BNI, hingga plang-plang petunjuk arah pengrajin batik juga oleh BNI. Selain itu, BNI juga memberikan pinjaman modal lunak bagi mereka-mereka para pengrajin batik. Ada beberapa pengrajin yang memang langsung menjadi binaan dari BNI. Banyak hal yang telah dilakukan oleh BNI dalam membangun desa wisata batik Desa Babagan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Kepala Desa sebagai berikut, “BNI sudah banyak memberikan partisipasinya. Terutama dalam hal sarana prasarana. Ada plang-plang yang di jalan itu juga dari BNI, ada bentukan KUB kelompok usaha ...” (W3/KD/30.06.2015).

Hal senada juga dikemukakan Bu SW yaitu sebagai berikut,

BNI yang selama ini terus menerus membantu desa ini dalam mengembangkan potensi desa wisata batik. Mulai dari bantuan pinjaman dana, pembenahan infrastruktur desa ada plang-plang, sampai showroom ini Mas yang kita tempati ini hasil dari kerjasama ... (W1/PB/29.06.2015)

Apa yang dikemukakan oleh Bapak Kepala Desa berikut Bu SW menunjukkan bahwa BNI telah banyak berperan penting bagi pembangunan

Desa Wisata Batik Desa Babagan. Justru ini barangkali momennya perbankan dalam menyelenggaraan pengabdianya kepada masyarakat dalam bentuk CSR (*Corporated Sosial Responsibility*). Hal ini tidak hanya dilakukan BNI di Desa Babagan saja, namun telah banyak daerah-daerah lain yang telah menjadi mitra binaan BNI sebagai kegiatan CSRnya. Bahkan secara riil di masyarakat, justru pihak swasta yang lebih banyak berperan dalam pembangunan dibanding pemerintah. Hal demikian dijumpai peneliti pada album BNI, yang isinya daerah-daerah CRS BNI di seluruh Indonesia.

Terkait pembangunan showroom oleh BNI untuk dimanfaatkan para pengrajin batik di Desa Babagan, berikut yang disampaikan Bapak JSP,

... seperti apa yang kita lihat sekarang ini dari depan masuk desa ini ada gapura besar yang baru selesai dibangun, ada showroom BNI, lalu plang-plang petunjuk arah keberadaan para pengusaha batik, serta pinjaman-pinjaman yang sifatnya bergulir itu semua hasil yang diberikan oleh BNI. (W2/PB/29.06.2015)

Showroom dimaksudkan oleh BNI agar para pengrajin batik yang ada di Desa Babagan semua bisa memanfaatkan showroom itu untuk menitipkan hasil usahanya, sebagai tempat pemasaran. Sehingga apa yang diberikan sekaligus dibangun oleh BNI untuk warga masyarakat Desa Babagan itu secara cuma-cuma. Hal ini sesuai apa yang tegaskan oleh Bapak Kepala Desa, "... memang semua itu BNI memberikan secara cuma-cuma, dan ini mungkin memang sudah menjadi tugasnya BNI sebagai lembaga swasta memberikan pengabdianya kepada masyarakat sekaligus menjadi mitra kerja, mitra usaha bagi masyarakat" (W3/KD/30.06.2015). Bapak Kepala Desa juga menegaskan kembali bahwa, showroom itu memang didirikan oleh BNI dengan tujuan agar dapat menampung batik-batik dari pengrajin yang ada di Desa Babagan. Para pengrajin batik bisa menitipkan batiknya di showroom itu hingga aktivitas pra koperasi terjadi dalamnya (W3/KD/30.06.2015).

Dari ungkapan Bapak Kepala Desa tersebut, sebelumnya Bapak JSP mengemukakan,

BNI membangun showroom itu juga dengan maksud sebagai koperasi untuk para pengrajin batik yang ada di Desa Babagan, tapi maaf Mas saya tidak begitu tahu menahu keberlanjutan showroom itu. Yang pasti sudah banyak pengrajin sini menitipkan batiknya di showroom ... (W2/PB/29.06.2015)

Bapak JSP juga menambahkan hal yang terkait showroom tersebut yaitu,

Beda Mas antara showroom yang di Desa Babagan yang bangun oleh BNI dengan showroom yang besar itu ya showroom batik Lasem itu yang juga sebagai tempat koperasi. Kalau di sana ada simpanan pokok 500 ribu, tapi simpanan wajibnya belum ada. Tapi saat ikut menitipkan 10% untuk koperasi setiap penjualan yang laku. Kalau yang showroom BNI yang ada di depan dekat gapura desa, saya tidak tahu bagaimana pengelolaannya Mas, tapi bisa tanya-tanya saja ke Mbak SW. (W2/PB/29.06.2015)

Kaitannya dengan hal ini, bagaimana showroom yang ada di Desa Babagan itu dalam pengelolaannya, Bu SW menyampaikan demikian, "... Sebetulnya kalau dikelola untuk koperasi juga bisa, tapi orang-orang itu mereka belum faham kalau ..." (W7/PB/01.09.2015).

Dari berbagai pernyataan hasil penelitian mengenai apakah showroom yang dibangun oleh BNI di Desa Babagan itu dapat merespon terbentuknya koperasi adalah tentunya begitu dan pasti bisa menjadi koperasi. Namun, ada beberapa hal yang perlu dilakukan kaitannya dengan memberikan pemahaman kepada mereka para pengrajin batik yang ada di Desa Babagan. Bahwa dengan adanya showroom kemudian bisa dimanfaatkan sebagai koperasi, ada kegiatan simpan pinjam, usaha bersama, maka mereka pun dapat memetik hasilnya. Sebagaimana uang simpan itu dapat dijadikan dana modal bergulir bagi para pengrajin batik Desa Babagan. Dengan begitu, mereka ada aktivitas dalam mengelola keuangan bersama hasil usaha bersama pula dalam menjual batik. Jika dipahami dengan tidak sengaja, saat mereka memberikan sebageian uang kepada penjaga showroom tadi, maka itu mereka telah melakukan suatu kegiatan pra koperasi.

Showroom yang telah dibangun oleh BNI bertujuan untuk memfasilitasi para pengrajin

batik di Desa Babagan agar hasil usaha atau batiknya bisa dititipkan/dijual melalui showroom tersebut tanpa adanya pungutan biaya sepeserpun. Dari kegiatan menitipkan itulah telah tergambar suatu kegiatan usaha bersama dalam kelompok, istilah penyebutannya adalah KBU (kelompok belajar usaha). Dari kegiatan itu pula, dapat merespon terbentuknya koperasi di kemudian hari. Dari beberapa aktivitas memang telah terjadi kegiatan mengarah ke pra koperasi, namun masyarakat belum menyadari itu semua. Hal ini dirasa perlu diadakannya pemahaman bersama dengan masyarakat.

Setidaknya showroom itu dikelola bersama secara transparan, sehingga semua warga masyarakat yang ada di sekelilingnya dapat mengetahui sekaligus memahami agar tidak terjadinya timbulnya suatu prasangka yang tidak baik dari masyarakat. hal ini pulalah demikian dengan adanya koperasi akan terjadi pemerataan distribusi keuntungan berusaha yang terjadi di Desa Babagan. Sebagaimana yang telah disampaikan Hadiwijoyo (2012: 83) bahwa, bentuk pariwisata memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata, memberikan keuntungan kepada masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-usaha pariwisata dan menuntut pemberdayaan secara politis dan demokratisasi dengan distribusi keuntungan kepada komunitas yang kurang beruntung. Oleh karenanya, dengan begitu terbentuknya koperasi tersebut selain dapat memberikan dana bergulir bagi para pengrajin batik juga sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai aktivitas simpan pinjam oleh seluruh warga masyarakat di daerah tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Simpulan yang didapatkan dari hambatan internal (kelemahan) yang terjadi meliputi; (a) masih rendahnya partisipasi masyarakat, (b) pendidikan rendah, (c) ambisi tinggi tanpa diimbangi dengan kemampuan dan ketekunan, (d) belum terbentuknya koperasi usaha atau koperasi simpan pinjam, (e) fungsi Pokdarwis yang kurang maksimal, (f) infrastruktur atau

sarana prasarana yang kurang memadai, (g) terbatasnya akses pemasaran hasil usaha, (h) belum adanya pengelolaan terutama yang berfungsi sebagai guide (sumber informasi awal) bagi wisatawan yang berkunjung, sehingga kelengkapan sumber informasi desa wisata masih rendah, (i) rendahnya partisipasi pemerintah desa, (j) tidak adanya aktivitas kegiatan kecakapan tambahan seperti pelatihan membatik, pelatihan membuat alat perlengkapan serta bahan membatik, dan (k) fungsi showroom yang belum maksimal. Sedangkan hambatan eksternal (tantangan) meliputi; (a) terbatasnya akses pinjaman modal yang relatif besar terutama bagi pengusaha kecil, (b) terbatasnya akses pinjaman modal dengan Bank BNI selaku mitra kerja pengembang Desa Wisata Batik di Desa Babagan, (c) rendahnya partisipasi pemerintah daerah serta pemerintah pusat, (d) tingginya persaingan pasar usaha, (e) adanya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) membuat pangsa pasar semakin terbuka lebar dan peluang usaha semakin ketat, (f) kurangnya pembinaan dan pendampingan dari dinas terkait, (g) produk alat dan bahan dasar membatik yang kian tinggi persaingannya, serta pemenuhan kebutuhan alat dan bahan membatik masih mengandalkan dari daerah lain, (h) belum terjangkaunya batik tulis bagi masyarakat umum, karena harganya yang relatif lebih mahal dibanding dengan batik cap maupun batik pabrik, dan (i) ancaman batik tulis sebagai warisan budaya Bangsa Indonesia dialihnamakan atau diakui sebagai warisan budaya bangsa lain.

Adapun Strategi alternatif yang diterapkan dalam mengembangkan desa wisata batik dapat dilakukan dengan; (a) mendorong masyarakat dan pemerintah untuk dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya kegiatan wisata sekaligus masyarakat dapat menjadi pelaku sektor kepariwisataan dan penguatan usaha tersebut, (b) mengikutsertakan masyarakat dalam berbagai kegiatan desa wisata batik, sebagai contoh menjadikan pengurus organisasi, mengikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan serta pameran batik, (c) di setiap penyelenggaraan kegiatan desa wisata batik, pemerintah dilibatkan paling tidak sebagai donatur penyelenggara kegiatan, (d) diadakannya kegiatan pelatihan-

pelatihan berbasis *hardskill* dan *softskill* serta pembinaan dan pendampingan dari dinas terkait, sebagai contoh oleh dinas kepariwisataan, (f) diselenggarakannya pelatihan-pelatihan strategi pengelolaan usaha, strategi pemasaran serta kiat sukses dalam berwirausaha, (g) merintis pembentukan koperasi oleh para pengrajin batik di Desa Babagan dengan adanya dana bergulir, serta memfungsikannya sebagai tempat simpan pinjam usaha dan kelompok usaha bersama (KBU), (h) menata kembali organisasi pengelola desa wisata batik, sebagai contoh dengan menegaskan tupoksi masing-masing, pengadaan pelatihan kepemimpinan dan mempercayakan segala kegiatan pengelolaan desa wisata batik pada para pengelolanya, (i) rekondisi pengelolaan showroom yang telah ada sebagai fasilitas bersama secara merata bagi semua para pengrajin batik di Desa Babagan, dan (j) peningkatan infrastruktur yang memadai dalam menunjang optimalisasi pengembangan desa wisata batik. Berikut pula mengenai keberadaan showroom yang telah dibangun dapat merespon tumbuhnya koperasi di Desa Babagan, dikarenakan telah adanya beberapa kegiatan yang mengarah terbentuknya kegiatan pra koperasi dari adanya pengelolaan showroom tersebut.

Saran

Beberapa kelemahan dan tantangan harus diatasi dengan adanya sinergitas kerjasama bersama antara para pengrajin batik, warga masyarakat, pihak swasta dan pemerintah. Kegiatan yang dilakukan jangan sampai tumpang tindih. Komitmen keras juga harus dimiliki semua warga masyarakat Desa Babagan dalam mengembangkan potensi desa wisata batiknya dengan berpegangteguh pada prinsip dari, oleh dan untuk bersama masyarakat juga kembalinya. Beberapa strategi alternatif yang telah dirumuskan dapat tindaklanjuti dalam rangka pengembangan desa wisata batik Desa Babagan.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
_____. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Badan Pusat Statistik. 2008. *Studi Penentuan Kriteria Penduduk Miskin: Metodologi Penentuan Rumah Tangga Miskin*. Jakarta.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2013. *Jawa Tengah dalam Angka*. Semarang.

Badan Pusat Statistik Kota Semarang. 2013. *Kota Semarang dalam Angka*. Semarang.

Bungin, B. 2009. *Metodologi penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.

Creswell, J. W. 2012. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Creswell, J. W. 2012. *Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*. Boston: Phoenix Color Corp.

Departemen Dalam Negeri. 1996. *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakarta: Penebar Swadaya.

Faisal, S. 2010. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hadiwijoyo, S. S. 2012. *Perencanaan pariwisata pedesaan berbasis masyarakat; suatu pendekatan konsep*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Yogyakarta: Rhinheka Rasa.
<http://www.biology-online.org/dictionary/Conservation> , diakses pada 29 Maret 2009.

Johnson & Christensen. 2000. *Educational research: quantitative and qualitative approaches*. Boston: Allyn and Bacon.

Loureiro, S. M. C. 2012. *Tourism in Rural Areas: Foundation, Quality and Experience. Visions for Global Tourism Industry - Creating and Sustaining Competitive Strategies, Dr. Murat Kasimoglu (Ed.)*. ISBN: 978-953-51-0520-6, InTech.

Moleong, L. J. 2009. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Miles, M.B. & Huberman, A.M. 1994. *Qualitative data analysis*. London: Sage Publications.

Mustafa, Z. EQ. 2009. *Mengurai variabel hingga instrumentasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Nuridin, Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*.
- Okech, R. etc all. 2012. *Rural tourism as a sustainable development alternative: an analysis with special reference to Luanda, Kenya*. Cultur / Year 6 - No. 03 - Aug (2012). Special issue. Canada. Revista de Cultura e Turismo.
- Panjaitan, F. P. 2013. *Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan melalui model kampung konservasi di Desa Malasari Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor*. Tesis Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan. Yogyakarta: PPs UGM.
- Purnamasari, I. 2008. *Studi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi*. Tesis Program Studi Magister Ilmu Administrasi Konsentrasi Magister Administrasi Publik. PPs Universitas Diponegoro Semarang.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*
- Soetomo. 2010. *Strategi-strategi pembangunan masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2011. *Pemberdayaan masyarakat: mungkinkah muncul antitesisnya?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar..
- _____. 2014. *Kesejahteraan dan upaya mewujudkannya dalam perspektif masyarakat lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunaryo, B. 2013. *Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata; konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Thomafi, N. F. 2013. *Development community based on the potential local through developing village tourism in Babagan Village Lasem Subdistrict Rembang City*. Essay of governmental science, Faculty of Social and Political Science, Brawijaya University.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara

